

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Hingga tahun 2000, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Saat ini, sejumlah negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam telah mencapai tingkat berpendapatan menengah. Namun fenomena pertumbuhan yang tinggi kini menghadapi tantangan perlambatan.

Perekonomian Indonesia telah menikmati pertumbuhan tahunan sebesar 6 persen, tetapi berbagai tantangan domestik memberikan kerentanan dalam perekonomian. Skandal besar seperti 1MDB (*1Malaysia Development Berhad*) yang mencuat tahun 2015 menurunkan kepercayaan investor asing dan domestik, menyebabkan aliran keluar modal, serta menurunkan peringkat risiko investasi Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Filipina yang luar biasa tidak akan bertahan lama jika investasi dalam negeri tidak ditingkatkan. Pertumbuhan Thailand terhenti di tengah gejolak politik. Pertumbuhan ekonomi Vietnam yang mengesankan tetap mengandung beberapa masalah sektor perbankan, inflasi yang tinggi, dan korupsi yang merajalela. Apakah kelima negara tersebut berada dalam bahaya jebakan klasik yaitu perangkap pendapatan menengah (*Middle Income Trap*, MIT). Suatu perlambatan pertumbuhan yang sering terjadi ketika negara-negara berkembang mencapai tingkat negara berpendapatan menengah? (Wilson, 2014).



MIT pertama kali disebutkan pada tahun 2007 dalam laporan Bank
1 *East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth* (Gill et al., 2007).
20gi “jebakan berpendapatan menengah” (*Middle Income Trap*) digunakan

untuk mengkarakterisasi situasi perlambatan atau stagnasi ekonomi yang dialami negara-negara berpendapatan menengah, yang mencegah mereka “naik” ke tingkat yang lebih tinggi. Agéno et al., (2012), Agénor dan Canuto (2015) mendefinisikan *middle income trap* sebagai keadaan suatu negara yang mengalami stagnasi pertumbuhan di tingkat pendapatan menengah dan tidak berkembang ke tingkat pertumbuhan ekonomi selanjutnya ke pendapatan tinggi.

Negara yang terjebak dalam MIT tidak mampu berkompetisi dengan negara *low income* dalam hal upah buruh di industri manufaktur (Felipe, 2012). Pendapatan (upah) masyarakatnya sudah tinggi sehingga kurang menarik bagi industri manufaktur. Namun mereka juga belum mampu untuk berkompetisi dengan negara *high income* dalam hal keahlian dan kemajuan inovasi. Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut tidak sukses dalam peralihan sumber pertumbuhan ekonomi dari sumber daya dengan upah dan modal rendah ke sumber pertumbuhan berupa produktivitas berbasis perekonomian inklusif dan ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*).

Pengelompokan negara-negara berdasarkan pendapatan mengacu pada klasifikasi Bank Dunia (Tabel 1.1) . Standar pengelompokan ini selalu diperbaharui setiap tahun.

Tabel 1. 1 Klasifikasi Negara berdasarkan PNB Perkapita per 01 Juli 2022 (*Atlas Method*)

Kelompok	PNB per kapita (US\$)
Pendapatan Rendah (<i>Low Income</i>)	< 1.085
Pendapatan Menengah - Bagian Bawah (<i>Middle Income - Lower</i>)	1.086 – 4.255
Pendapatan Menengah - Bagian Atas (<i>Middle Income - Upper</i>)	4.256 – 13.025
Pendapatan – Tinggi (<i>High Income</i>)	>13.025

Sumber: <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2022-2023>



Pengelompokan Negara-negara di ASEAN berdasarkan PNB (Atlas pada tahun 2023 yaitu pendapatan tinggi adalah Singapura (US\$ 69.850)

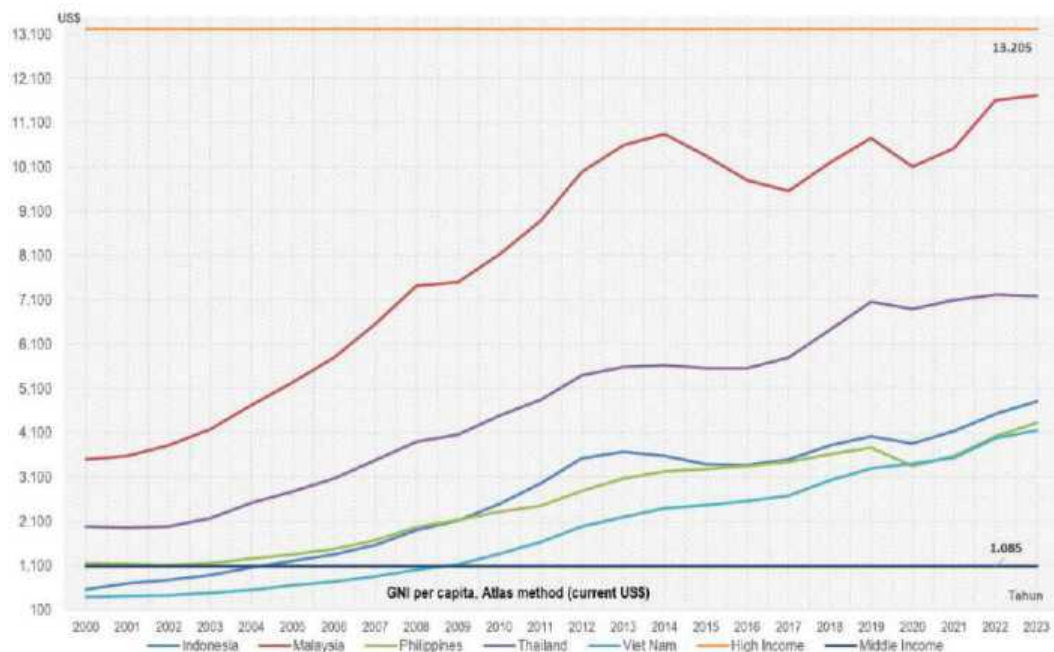
dan Brunei (US\$34.390). Pendapatan menengah – bagian atas antara lain Malaysia (US\$11.710), Thailand (US\$7.190), Indonesia (US\$4.810) dan Filipina (US\$4.320). Pendapatan menengah – bagian bawah adalah Vietnam (US\$4150), Laos (US\$2.110), Timor Leste (US\$ 2.020), Kamboja (US\$ 2.390), dan Myanmar (US\$ 1.230). Grafik GNI perkapita menggunakan metode Atlas (Lampiran 1).

Peneliti menetapkan lima negara berpendapatan menengah, yang terdiri dari empat negara menengah – bagian atas yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina ditambah satu negara menengah – bagian bawah yang tertinggi yaitu Vietnam. Empat negara lainnya tidak dimasukkan dengan beberapa pertimbangan yaitu fluktuasi pertumbuhan khususnya pada Timor Leste, nilai pendapatan per kapita masih sekitar US\$2.000 hingga tahun 2023 dan ketidaklengkapan data.

Kamboja, Laos, dan Myanmar meski berstatus berpendapatan menengah namun tergolong negara sangat tidak demokratis dan relatif tertutup, sehingga kurang layak menjadi objek riset kuantitatif terutama yang berbasis data agregat. Dalam sistem otoriter, data resmi sering tidak lengkap atau akurat karena dikontrol pemerintah. Terdapat peranan politik dalam informasi dan keterbatasan mekanisme akuntabilitas non-elektoral yang membatasi transparansi. Laporan ekonomi dan sosial kadang disesuaikan untuk kepentingan politik, sehingga validitasnya diragukan, berpotensi menimbulkan bias dan mengganggu akurasi model statistik (Aragão & Linsi, 2022; Briviba et al., 2024; Case, 2011; Chen & Xu, 2017; Gainsborough, 2012; Magee & Doces, 2015; Martínez, 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Isu pertumbuhan ekonomi memiliki urgensi tersendiri. Dalam situasi perekonomian domestik dan internasional yang normal, di lima negara ASEAN memiliki laju pertumbuhan yang berbeda.

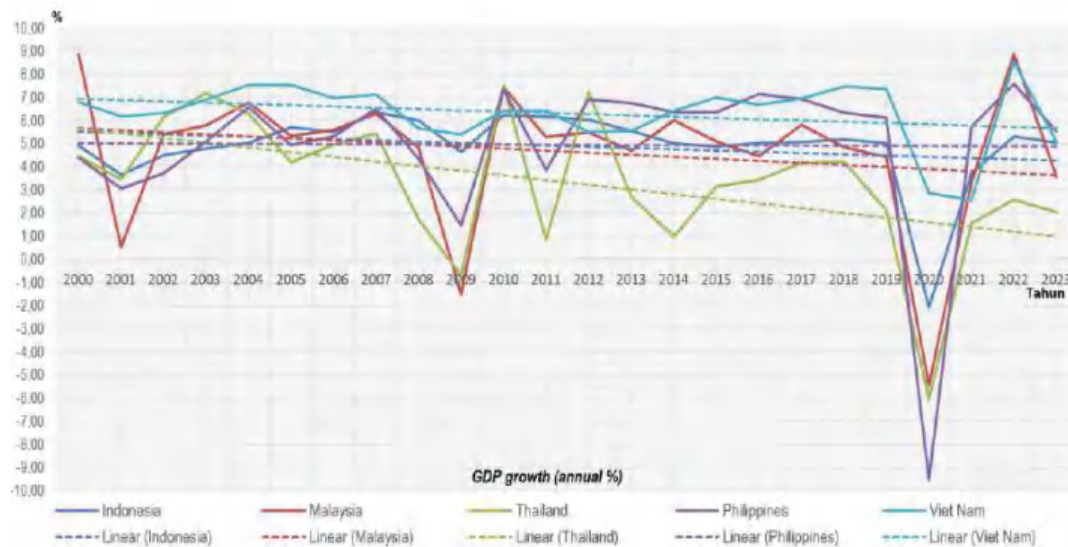




Gambar 1. 1 PNB Perkapita 5 Negara ASEAN Tahun 2000-2023 (Atlas Method, current US\$)

Namun bila melihat kecenderungan (*trend*) PDB lima negara ASEAN periode 2000-2023 dapat ditarik kesimpulan semakin menurun (Gambar 1.2). Tingkat pertumbuhan rata-rata di negara-negara berpenghasilan menengah di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina, telah melambat setelah krisis keuangan Asia. Negara-negara tersebut kini berada dalam situasi sebagai negara berpendapatan menengah yang diperkirakan sulit mengangkat perekonomiannya menjadi negara maju atau berpendapatan tinggi. Walaupun pertumbuhan ekonomi yang kuat di seluruh anggota ASEAN telah mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, ada kekhawatiran pertumbuhan akan terhambat di masa depan (Giap et al., 2017). Jelas bahwa Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam harus menyelesaikan masalah pertumbuhan agar dapat mengatasi MIT. Suatu negara yang masuk ke dalam *come trap* akan membawa berbagai masalah seperti de-industrialisasi, pengangguran dan selanjutnya adalah kerawanan sosial.





Gambar 1. 2 Pertumbuhan PDB 5 Negara ASEAN Tahun 2000-2023 (%)

Berbagai kebijakan fiskal dan moneter dalam satu dekade terakhir telah diterapkan negara-negara ASEAN untuk mengakselerasi pertumbuhan. Kebijakan fiskal di Indonesia bertujuan menstabilkan ekonomi dengan melawan tren ekonomi yang sedang *booming* atau resesi melalui langkah-langkah fiskal. Kebijakan tersebut seperti pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak selama resesi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, menarik kembali stimulus fiskal selama periode pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk mencegah *overheating* ekonomi. Hal ini diartikulasi ke dalam beberapa kebijakan seperti *pertama*, peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur (proyek strategis nasional), pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah tarif pajak, undang-undang *tax amnesty* (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak) dan memperluas basis pajak. *Ketiga* pengelolaan utang negara melalui penerbitan obligasi dan pinjaman (Kementerian Keuangan, 2023). *Keempat*, subsidi pemerintah sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, atau bahan pangan. Tujuannya adalah



menjaga kestabilan ekonomi, terutama di tengah ancaman resesi ekonomi. Kebijakan pemerintah Thailand di bidang fiskal, seperti memberikan insentif

pajak, paket stimulus dan pemberian uang tunai. Kebijakan fiskal pemerintah Filipina bertujuan memperbaiki keuangan pemerintah melalui administrasi perpajakan dan belanja yang efisien (The World Bank, 2014). Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan fiskal seperti pembebasan, pengurangan, dan perpanjangan waktu pembayaran pajak dan biaya sewa tanah.

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang moneter meliputi strategi kebijakan moneter dan implementasi kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia adalah *Inflation Targeting Framework* (ITF), kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode kedepan. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antarbank sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara resmi sejak 1 Juli 2005 (Bank Indonesia, 2024). Selain pengaturan suku bunga, kebijakan moneter *countercyclical* lainnya adalah intervensi di pasar valas untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, penurunan persyaratan margin, perpanjangan jangka waktu kredit, atau mendorong akses perusahaan dan individu terhadap kredit. Di bidang moneter, pemerintah Thailand dan Vietnam melakukan pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Mengurangi suku bunga pinjaman untuk membantu kredit sektor usaha. Dibiidang moneter, Filipina secara resmi mengadopsi penargetan Inflasi sebagai kerangka kebijakan moneter pada Januari 2002. Untuk tahun 2009, sasaran inflasi ditetapkan sebesar 3,5 persen, dengan tingkat toleransi 1 persen, dan 4,5 persen untuk tahun 2010, juga memiliki toleransi 1 persen. Selain itu, Dewan Moneter Filipina mengumumkan target sekitar 4 ± 1 persen dari tahun 2012-2014 (Banko Sentral NG Pilipinas, 2011). Namun hingga

semua kebijakan yang di terapkan oleh keempat negara tersebut belum menghasilkan pertumbuhan yang memuaskan.



Berbagai penelitian ekonomi menunjukkan arti pentingnya faktor ekonomi terhadap pertumbuhan. Tiga di antaranya adalah keterbukaan perdagangan (*trade openness*), investasi dan belanja pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Gries & Redlin, 2012; Karras, 2003; Keho, 2017; Tahir et al., 2019).

Khusus investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*, FDI), jenis investasi ini memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Dimana FDI membawa teknologi, modal, dan manajemen yang diperlukan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu yang pada akhirnya meningkatkan produktifitas agregat, dan itu berarti terjadi pertumbuhan (Adams, 2009; Agrawal & Khan, 2011; Borensztein et al., 1998; Nosheen, 2013).

Penelitian-penelitian sebelumnya secara umum menemukan bukti empiris mengenai hubungan antara belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, serta kesenjangan (Butkiewicz & Yanikkaya, 2011; Dudzevičiūtė et al., 2018; Kimaro et al., 2017; Viqra Ramadanti et al., 2023; Wu et al., 2010).

Penelitian-penelitian tersebut tadi juga menyinggung peranan kualitas kelembagaan bersama faktor-faktor ekonomi dalam mempengaruhi pertumbuhan. Hal ini melahirkan kesadaran bahwa terdapat unsur lain dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dikaji secara khusus. Unsur lain tersebut bersifat faktor selain ekonomi (*non economic factor*), yaitu tata kelola (*governance*).

Diskursus pengaruh kualitas tata kelola terhadap kinerja perekonomian sudah dilakukan sejak lama. Topik ini dirasa semakin penting pada awal dekade 2000-an. Globalisasi, isu lingkungan, gerakan sipil (*civil society movement*) dan

asi wanita dan lain sebagainya memunculkan sebuah kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang memadai. Tuntutan kontemporer terhadap



akuntabilitas sektor publik begitu luas menyiratkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan memerlukan kajian kritis. Tata kelola menetapkan kerangka kerja untuk aktivitas ekonomi di suatu negara. Tata kelola yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendorong aktivitas ekonomi (Kaufmann et al., 1999; Yerrabati & Hawkes, 2015). Walaupun, penelitian lain juga menyimpulkan bahwa hubungan tata kelola terhadap pertumbuhan adalah ambigu (Lahouij, 2017).

Tidak bisa dipungkiri Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam mengalami persoalan dalam tata kelola. Indonesia masih mengalami persoalan-persoalan seperti demokrasi (Investor Daily, 2020), korupsi (BPKP, 2016), dan supremasi hukum (Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, 2023; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2023). Malaysia menghadapi persoalan tingginya segregasi komunal, korupsi dan kinerja buruk pemerintah persatuan di kursi-kursi mayoritas Melayu (Anuar, 2023; Lopez, 2024). Thailand hingga kini belum bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti demokrasi yang dirongrong oleh monarki dan militerisasi (BBC News, 2020; Pangestu, 2023; Sidik, 2023), korupsi (BBC News, 2017), teror dan kekerasan (Metro TV, 2022). Vietnam juga mengalami persoalan yang sama menyangkut kebebasan sipil dan hak asasi manusia (Borowska & Purwaningsih, 2009; Hutt, 2025; Walker, 2024), korupsi (Binekasri, 2023; CNN Indonesia, 2024; IDS Times, 2024), dan efektifitas pemerintahan (Hansson, 2015). Filipina dengan masalah keamanan, demokrasi (Ines & P.Santos, 20223; Mendoza et al., 2022), dan mafia narkoba (VOA, 2023).

Indikator menunjukkan seberapa baik tata kelola suatu negara dapat dari Bank Dunia yang disebut *World Governance Indicator*. Bank Dunia ang tata kelola sebagai cara pelaksanaan kekuasaan dalam pengelolaan

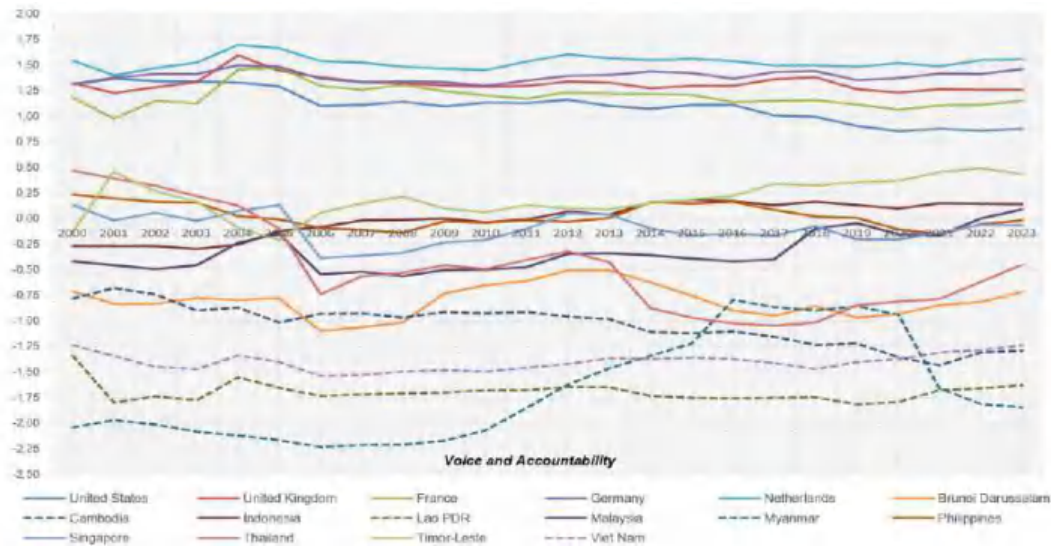


sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan (World Bank, 1992). Definisi luas tersebut kemudian diturunkan menjadi tiga kluster (*clustering*) aspek yang konsisten pada gagasan tata kelola yaitu kluster politik (*political cluster*), kluster ekonomi (*economic cluster*), dan kluster institusi (*institutional cluster*) (Kaufmann, 2012; Kaufmann & Kraay, 2002).

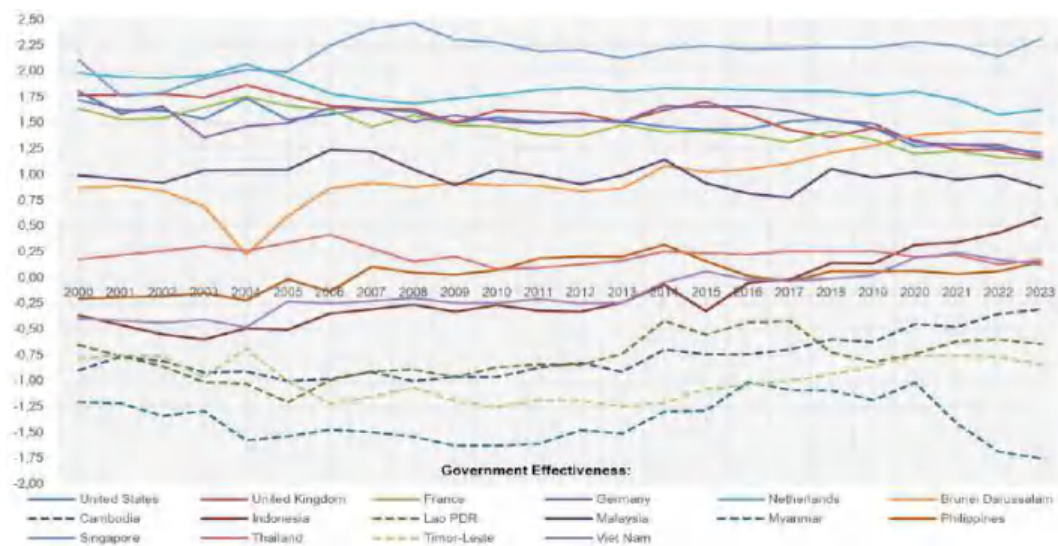
Kluster politik adalah proses di mana mereka yang berwenang (*which those in authority*) dipilih dan diganti. Kluster ini dapat dinilai dari dua indeks yaitu kebebasan berbicara dan akuntabilitas demokrasi (*voice and democratic accountability*), serta stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme (*political stability and absence of violence/terrorism*). Kluster ekonomi, menunjukkan kapasitas pemerintah melaksanakan kebijakan dan menyediakan layanan publik. Kluster ini terdiri dari dua indeks, yaitu efektivitas pemerintah (*government effectiveness*), dan kualitas peraturan (*regulatory quality*). Kluster institusi (kelembagaan) merangkum secara luas rasa hormat warga negara dan negara terhadap lembaga-lembaga yang mengatur interaksi mereka. Terdiri dari indeks supremasi hukum (*rule of law*), dan pengendalian terhadap korupsi (*control of corruption*).

Salah satu cara yang mudah untuk mengetahui hubungan antara tata kelola dengan perekonomian melalui pendekatan komparasi (membandingkan). Berikut indikator tata kelola yang ditampilkan dalam bentuk grafik. Tiga indikator tata kelola negara-negara ASEAN. Ditambahkan lima negara *high income* (Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan Belanda) sebagai pembanding.

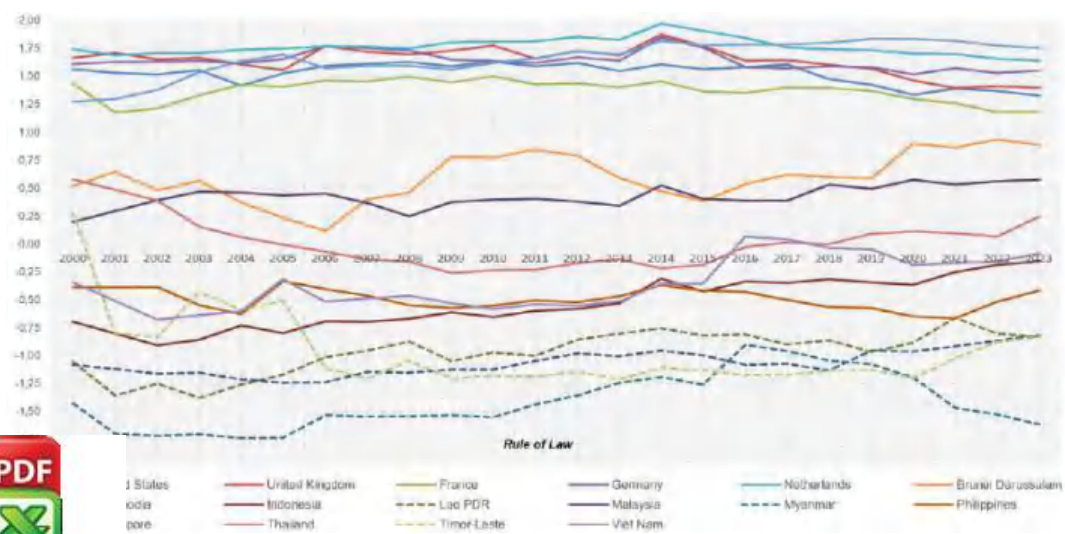




Gambar 1. 3 Indikator Tata Kelola: Berbicara dan Akuntabilitas Demokrasi



Gambar 1. 4 Indikator Tata Kelola: Efektifitas Pemerintahan



Gambar 1. 5 Indikator Tata Kelola: Supremasi Hukum



Nampak dengan jelas perbedaan tata kelola antara *high income* dengan negara-negara ASEAN. Amerika, Inggris, Jerman, Prancis dan Belanda beserta Singapura, Brunei dan Malaysia memiliki nilai indikator rata-rata sebesar satu ke atas. Sedangkan negara-negara lainnya bernilai di bawah satu bahkan ada yang negatif. Hal ini memberi kesimpulan awal bahwa tata kelola di negara-negara *high income* lebih baik.

Hubungan tata kelola dengan pertumbuhan ekonomi, dapat dikaji dengan melihat hubungan itu secara langsung ataupun tidak langsung. Seringkali penelitian hanya melihat hubungan tata kelola terhadap pertumbuhan dengan faktor ekonomi sebagai variabel kontrol. Peneliti sependapat dengan Jesús Peiró-Palomino bahwa terdapat faktor lain yang berada diantara kualitas tata kelola dan pertumbuhan (Peiró-Palomino, 2019). Untuk dapat mengetahui bagaimana sebenarnya proses bekerjanya faktor ekonomi dan tata kelola dalam mempengaruhi pertumbuhan, maka hal tersebut dapat dilihat melalui sektor-sektor perekonomian. Kualitas tata kelola yang baik akan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi, dan seterusnya sektor tersebut meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, perkembangan sektor-sektor perekonomian akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, pemasukan negara dan efek penganda (*multiplier*) lainnya berkontribusi pada laju perekonomian agregat.

Penelitian ini memilih sektor industri sebagai mekanisme mediasi (*intervening*) dalam model yang dikembangkan. Pemilihan ini didasarkan pada pentingnya sektor industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh K.

, (2020), J. Y. Lin dan Wang (2020), Ohno (2009b, 2009a), Paus (2012) dan de (2016) bahwa untuk mengatasi MIT, diperlukan kebijakan yang



mencegah deindustrialisasi dini serta mendorong pengembangan industri berbasis teknologi, inovasi dan padat pengetahuan.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ternyata di luar faktor ekonomi (*non economic factor*), seperti tata kelola (*governance*), sangat berpengaruh ke dalam proses ekonomi. Hal ini terbukti dari data-data yang ada maupun pengalaman negara-negara lain melalui hasil penelitian empirik. Bila fokus mengatasi jebakan pendapatan menengah maka diskursus mengarah pada lima negara *middle income* di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Apa yang selama ini terjadi, memerlukan penelitian lebih dalam. Ontologi ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan (*growth*) dan penyebab masalah *growth* adalah *governance*. Oleh sebab itu, berdasarkan gambaran di atas maka muncul pertanyaan penelitian berkaitan dengan seperti apa sesungguhnya, dan lewat transmisi apa, berbagai faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bekerja di dalam proses pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN tersebut?

Penelitian ini mengusulkan suatu pendekatan yang *inovatif* dan *komprehensif* dalam menganalisis dinamika pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) yang berada dalam kategori pendapatan menengah (*middle-income countries*). Khususnya dalam konteks usaha mengatasi *Middle Income Trap* (MIT) dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*growth boosting*). Kebaruan utama penelitian ini terletak pada penggabungan perspektif ekonomi dan tata kelola. Ini berbeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya bersifat makro dan parsial. Originalitas terletak pada pandangan bahwa tata kelola bukan hanya faktor eksternal atau kontrol,

n menjadi faktor moderasi yang bekerja dalam hubungan fungsional variabel bebas dengan variabel terikat. Ini melampaui pendekatan yang



biasa digunakan dalam banyak penelitian WGI (*World Governance Indicators*). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kesenjangan literatur, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis dan praktis dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih kontekstual dan institusional.

1. 2 Rumusan Masalah

Dari pertanyaan penelitian di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui sektor industri?
2. Bagaimana pengaruh investasi asing Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui sektor industri?
3. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui sektor industri?
4. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui sektor industri?
5. Bagaimana tata kelola (*governance*) memoderasi pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui sektor industri?
6. Bagaimana tata kelola (*governance*) memperkuat memoderasi belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung melalui sektor industri?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan penelitian ini, adalah:



-

memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana pranata kelembagaan “bekerja” dalam kegiatan perekonomian, sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Wawasan ini memungkinkan peneliti dan praktisi dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk umum dan khusus dalam dinamika pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, menyediakan landasan konseptual pengembangan teori pertumbuhan ekonomi secara praktis dan kontekstual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang signifikan dalam kajian pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. *Pertama*, memberikan pandangan komprehensif kepada praktisi, terutama pengambil kebijakan dan aparatur pemerintah mengenai arti pentingnya tata kelola pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Memberikan kesadaran akan pentingnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan. Mengidentifikasi indikator tata kelola yang perlu dibenahi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, secara khusus memberikan manfaat praktis bagi lembaga pengawasan dan pembinaan (internal dan eksternal) dalam melaksanakan tugasnya demi mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Apa dilakukan yang selama ini dilakukan, dalam gambaran besar perekonomian agregat adalah sangat berarti.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Banyak peneliti mempertimbangkan dampak tata kelola (*governance*) terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hasil penelitian memberikan kesimpulan yang beragam, berpengaruh secara positif, negatif, atau tidak ada yang tidak berhubungan (tidak signifikan). Dari hasil yang berbeda-beda tersebut membuat penulis merasa perlu meneliti dampak tata kelola ekonomi, terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang di



ASEAN. Penelitian berguna sebagai dasar saran kebijakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi jangka panjang.

1. 5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup lima negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Pertimbangan kawasan dan tingkat perekonomian menjadi dasar penetapan. Kelima negara tersebut berada dalam satu kawasan ekonomi yaitu ASEAN dan juga berada pada kelompok ekonomi pendapatan menengah. Rentang waktu data-data selama 24 tahun (2000-2023) yang dianggap mewakili *record* pertumbuhan jangka panjang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Perdebatan Teori dan Konsep

2.1.1 Perdebatan Faktor Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor ekonomi yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain adalah keterbukaan perdagangan (*trade openness*), investasi asing langsung (*foreign direct investment*), belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan. Teori-teori ekonomi menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja menghasilkan produktifitas dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Penduduk suatu negara mendapat manfaat ketika pendapatan nasional negara tersebut meningkat. Oleh karena itu, pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran akhir dari bentuk hubungan kausal searah.

Diskursus modern tentang pertumbuhan ekonomi bermula dari pemikiran John Maynard Keynes, yang muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi besar (*Great Depression*) pada 1930-an. Keynes mengkritik keras teori ekonomi klasik dan neoklasik yang berasumsi bahwa mekanisme pasar bebas akan secara otomatis mencapai ekuilibrium dengan kesempatan kerja penuh. Teori klasik berlandaskan pada marginalitas dan perilaku konsumen, serta mempercayai bahwa produksi menciptakan permintaannya sendiri (*Say's Law*), sehingga peran pemerintah dianggap minimal (Djojohadikusumo, 1994; Skousen, 2001). Kontribusi utama Keynes adalah membalik asumsi tersebut. Ia menekankan bahwa dalam kondisi depresi, pasar gagal menciptakan permintaan yang cukup untuk menyerap seluruh hasil produksi.



Menurut Keynes, campur tangan aktif pemerintah sangat diperlukan, terutama melalui kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan agregat (Skidelsky, 2020). Belanja pemerintah, konsumsi, dan investasi domestik adalah komponen kunci untuk mendorong pertumbuhan dan mengatasi pengangguran.

Namun, teori Keynes mendapat kritik dari Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar yang menilai teori ini hanya efektif dalam jangka pendek. Sebagai pengembangan, mereka merumuskan model pertumbuhan jangka panjang yang dikenal sebagai Model Harrod-Domar. Model ini menekankan peran investasi tidak hanya sebagai pendorong permintaan agregat melalui *multiplier effect*, tetapi juga sebagai penentu kapasitas produksi jangka panjang (penawaran agregat) (Boediono, 2018).

Dua proposisi utama model Harrod-Domar meliputi: (i) produksi bergantung pada faktor modal, dengan efektivitas modal diukur melalui *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), dan (ii) akumulasi modal berasal dari tabungan domestik (Arief, 1998). Semakin tinggi tingkat tabungan dan semakin efisien penggunaan modal (ICOR rendah), maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Sebaliknya, ICOR tinggi mencerminkan inefisiensi, yang mengharuskan peningkatan investasi untuk menghasilkan output yang diharapkan. Dengan demikian, perdebatan antara teori Keynesian dan model Harrod-Domar menandai pergeseran penting dalam teori pertumbuhan, dari fokus jangka pendek menuju pembahasan struktural jangka panjang mengenai akumulasi modal dan efisiensi investasi.

Beberapa kelemahan teori Harrod-Domar (Jhingan, 2011): (i) kecenderungan menabung dan ICOR ternyata tidak konstan; (ii) penggunaan tenaga kerja dan modal tidak dapat dipergunakan dalam proporsi tetap; (iii) tidak memperhitungkan perubahan-perubahan pada harga, atau harga tidak akan selalu



konstan; dan (iv) asumsi suku bunga yang tetap adalah tidak realistis, perubahan suku bunga mempengaruhi investasi; (v) mengabaikan program pemerintah; (vi) mengabaikan perilaku wiraswasta; (vii) gagal membedakan barang modal dengan barang konsumsi. Dalam bahasa sederhana, kritik terhadap model Harrod-Domar pada dasarnya bertumpu pada proposisi bahwa output nasional tumbuh pada tingkat yang sama dengan tingkat investasi. Pada kenyataannya, proposisi ini sering tidak terbukti. Harrod-Domar keliru karena menganggap tidak penting faktor-faktor produksi lain seperti keterampilan tenaga kerja dan teknologi.

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik muncul pada 1950-1960an sebagai tanggapan terhadap kelemahan model Harrod-Domar dan sekaligus pengembangan dari pemikiran klasik. Salah satu model paling berpengaruh dalam pendekatan ini adalah model pertumbuhan Solow-Swan. Model ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan terutama pada kemajuan teknologi (Solow, 1956, 1970; Swan, 1956).

Kontribusi utama teori ini adalah kemampuannya menjelaskan mekanisme pertumbuhan yang stabil dan menghindari ketidakstabilan inheren yang ada dalam model Harrod-Domar. Dengan pendekatan matematis terhadap fungsi produksi dan distribusi pendapatan, Solow-Swan menunjukkan bahwa tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi merupakan determinan utama pertumbuhan output dalam jangka panjang (Mankiw, 2013). Namun, teori ini juga menyatakan bahwa peningkatan pertumbuhan akibat akumulasi modal tidak akan bertahan lama, karena adanya hukum hasil berkurang (*dampening effect of diminishing returns*). Satu-satunya penjelasan jangka panjang atas

ihan output per kapita yang berkelanjutan adalah kemajuan teknologi sifat eksogen (Aghion & Howitt, 2009).



Perdebatan penting dalam teori ini adalah tentang asumsi eksogenitas teknologi. Kritikus menyatakan bahwa teknologi seharusnya dijelaskan oleh faktor-faktor internal dalam sistem ekonomi, sehingga muncul teori pertumbuhan endogen. Meskipun demikian, teori Solow-Swan tetap menjadi fondasi utama dalam literatur pertumbuhan, berkontribusi besar terhadap pemahaman tentang peran tabungan dan teknologi dalam pembangunan ekonomi. Teori ini penting karena memberikan kerangka analitis yang stabil untuk digunakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis peningkatan produktivitas dan adopsi teknologi.

Teori pertumbuhan neoklasik dapat menjelaskan penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. *Pertama*, kurangnya pemanfaatan teknologi tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas faktor produksi, terutama modal dan tenaga kerja. *Kedua*, ketidakseimbangan birokrasi yang menghambat efisiensi alokasi sumber daya, mengurangi insentif berinvestasi dan memperbesar penyusutan (depresiasi) modal. *Ketiga*, tidak memanfaatkan peluang dalam integrasi perekonomian global.

Pada pertengahan 1980-an, teori pertumbuhan neoklasik menghadapi lima kritik utama (Djojohadikusumo, 1994; Jhingan, 2011). *Pertama*, teori ini dianggap terlalu sederhana karena mengasumsikan kondisi ideal seperti stabilitas politik, pasar persaingan sempurna, tingkat tabungan tinggi, dan tenaga kerja terlatih, yang jarang ditemui dalam kenyataan. *Kedua*, teori ini menganggap kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen, padahal kemajuan tersebut sering kali berasal dari aktivitas ekonomi seperti proses belajar, penelitian, dan akumulasi modal. *Ketiga*, akumulasi modal fisik dalam teori ini menghasilkan keuntungan

yang semakin menurun, sehingga membatasi pertumbuhan jangka panjang. *Keempat*, teori ini mengabaikan peran pengetahuan dan sumber daya



manusia, padahal keduanya merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. *Kelima*, teori ini menihilkan peran pemerintah, sementara di negara-negara berkembang, intervensi negara sangat penting untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Teori pertumbuhan endogen muncul pada akhir 1980-an sebagai respons terhadap keterbatasan teori pertumbuhan eksogen Solow-Swan yang menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksternal. Paul Romer dan Robert Lucas, Jr. merumuskan pendekatan baru yang menjadikan faktor-faktor pertumbuhan seperti pengetahuan, inovasi, dan akumulasi modal manusia sebagai variabel endogen dalam model ekonomi (Lucas, 1988, 1990; Romer, 1986, 1987, 1990). Pendekatan ini kemudian dikenal sebagai Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*) atau teori pertumbuhan baru.

Romer berfokus pada peran pengetahuan sebagai input produksi yang meningkatkan produktivitas marjinal secara berkelanjutan. Dalam kerangka keseimbangan kompetitif, ia menunjukkan bahwa perubahan teknologi dapat dimodelkan secara endogen, dihasilkan dari aktivitas investasi dalam penelitian dan pengembangan. Lucas menekankan pentingnya akumulasi modal manusia, baik melalui pendidikan dan *learning by doing*, sebagai kunci pembangunan ekonomi jangka panjang. Mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak selalu tunduk pada hukum pengembalian menurun, dan negara besar dengan kapasitas inovasi tinggi cenderung tumbuh lebih cepat.

Kontribusi utama teori ini adalah kemampuannya menjelaskan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan tanpa harus mengandalkan kemajuan teknologi sebagai pemberian eksternal. Hanya *improvement* teknologi

npu mengimbangi dampak buruk dari hasil yang semakin berkurang, atau kata lain, kemajuan teknologi tidak memenuhi asumsi atas hukum hasil



yang semakin berkurang. Teori ini menekankan pentingnya kebijakan publik dalam pendidikan, penelitian, dan dukungan terhadap inovasi, karena faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Secara historis, teori pertumbuhan berkembang secara berjenjang. Model Harrod-Domar dari aliran neokeynesian menekankan tabungan dan investasi sebagai motor pertumbuhan, namun mengabaikan peran populasi dan teknologi. Model Solow-Swan dari mazhab neoklasik menambahkan faktor populasi dan kemajuan teknologi, tetapi masih menganggap teknologi sebagai variabel eksogen. Romer dan Lucas memperbaikinya dengan menjadikan teknologi sebagai hasil dari aktivitas ekonomi internal. Jadi, titik perbedaan antara Harrod-Domar bersama Solow-Swan di satu sisi dengan Romer-Lucas pada sisi yang lain adalah antara *exogenous* dan *endogenous*.

Perdebatan antara ketiga pendekatan besar ini berkisar pada bagaimana memahami sumber-sumber pertumbuhan, peran teknologi, serta kebijakan yang efektif untuk mendorong pembangunan jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen menandai kemajuan penting dengan mengintegrasikan inovasi dan kebijakan sebagai faktor utama dalam proses pertumbuhan.

Teori pertumbuhan baru menjadi sangat berarti karena teori-teori pertumbuhan lama memerlukan usaha yang besar. Dalam hal ini perlu modal yang besar atau intervensi dari luar demi meningkatkan modal untuk pertumbuhan ekonomi. Peningkatan modal berarti membutuhkan uang yang tidak sedikit yang diperoleh dari pemasukan (pendapatan) negara. Tetapi bila belum mencukupi harus meminjam dari luar. Teori pertumbuhan endogen menjawab kelemahan atau kesulitan itu. Pertumbuhan bisa ditingkatkan dengan “usaha dari dalam”. Maka

ini mengutamakan teori endogen, dengan tetap memperhatikan teori tentang investasi dan kebijakan pasar terbuka.



Penulis juga mempertimbangkan kritik Todaro-Smith terhadap teori-teori berbasis pertumbuhan. Teori-teori ekonomi pembangunan yang berbasis pertumbuhan seperti dirumuskan oleh Harrod-Domar, Sollow-Swan dan termasuk Romer-Lucas menekankan pada modal (kapital), penduduk, pengetahuan dan teknologi. Namun, mekanisme pertumbuhan ekonomi yang terkandung dalam teori-teori tersebut tidak selalu berhasil dalam penerapannya. Kegagalan terjadi karena terlalu kaku mengimplementasikan asumsi klasik seperti pasar persaingan sempurna, tabungan-investasi, rasionalitas ekonomi, fleksibilitas harga-upah dan peran pemerintah minimal.

Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah keberhasilan program *Marshall Plan* pasca perang dunia II bagi pembangunan di kawasan Eropa. Bantuan modal tersebut berhasil mengangkat kawasan tersebut menjadi negara maju. Hal yang berbeda terjadi ketika lembaga-lembaga donor internasional memberi bantuan kepada negara-negara di kawasan Afrika, Asia dan Amerika Selatan (Latin). Beberapa negara-negara tersebut sukses tetapi sebagian besar gagal. Negara-negara Eropa yang menerima bantuan mempunyai kondisi struktural, kelembagaan, dan sikap yang diperlukan. Misalnya, pasar komoditas dan uang yang terintegrasi dengan baik, fasilitas transportasi yang sangat maju, tenaga kerja yang terlatih dan terdidik, motivasi untuk sukses dan birokrasi yang efisien, sedemikian rupa sehingga bantuan modal baru secara efektif dapat diproses menjadi tingkat output yang lebih tinggi. Di sisi lain, sering kali asumsi-asumsi klasik tersebut sulit diterapkan di negara-negara berkembang.

Fenomena tersebut terjadi karena ketidakmampuan membedakan antara syarat perlu (*necessary condition*) dan syarat cukup (*sufficient condition*)

& Smith, 2020). Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, syarat yang n adalah suatu kondisi yang harus ada, meskipun tidak harus cukup, agar



suatu peristiwa dapat terjadi. Kondisi ini harus dipenuhi agar pertumbuhan ekonomi dapat terjadi, tetapi keberadaan syarat perlu tersebut belum menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi yang optimal. Misalnya, pembentukan modal mungkin merupakan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, sebelum pertumbuhan output dapat terjadi, harus ada alat untuk memproduksinya. Contoh lain, ketersediaan sumber daya alam adalah syarat perlu untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun hanya memiliki sumber daya alam tidak secara otomatis menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Syarat yang mencukupi berarti suatu kondisi yang jika dipenuhi, akan menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi, meskipun mungkin tidak selalu diperlukan. Kondisi atau faktor ini, yang jika terpenuhi, maka akan secara pasti menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Contohnya, stabilitas politik, efisiensi birokrasi dan supremasi hukum. Sebelum pertumbuhan output dapat terjadi, memang harus ada alat untuk memproduksinya. Disinilah peranan modal, tenaga kerja terampil dan teknologi sebagai syarat perlu; tetapi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang maka dibutuhkan keberadaan syarat cukup. Arti pentingnya keberadaan syarat cukup dalam pembangunan ekonomi tidak hanya sebagai sarana pertumbuhan tetapi lebih dari itu, sebagai jaminan berlakunya distribusi hasil pembangunan kepada masyarakat luas.

Dalam konteks perekonomian agregat, syarat perlu dan syarat cukup dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor ekonomi dan faktor tata kelola mempengaruhi pertumbuhan melalui perkembangan sektoral. Syarat perlu

faktor ekonomi seperti pasar yang luas, investasi dan kapabilitas sumber manusia. Syarat cukup termasuk faktor tata kelola yang mencakup tiga



dimensi, yaitu *political governace*, *economic governance*, dan *institutional governance*. Sementara faktor ekonomi menjadi syarat perlu untuk memastikan ekonomi memiliki dasar untuk beroperasi; maka faktor tata kelola yang baik mendorong perkembangan sektoral dan lebih lanjut pertumbuhan ekonomi. Keduanya saling melengkapi, faktor ekonomi memberikan fondasi, sementara faktor tata kelola memungkinkan percepatan kegiatan perekonomian.

2.1.2 Perdebatan Faktor Tata Kelola dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam analisis arus utama seperti ekonomi neoklasik, terdapat empat jenis kendala utama yang mendapat perhatian besar yaitu preferensi individu, peluang teknologi, sumber daya fisik dan sumber daya manusia, serta peluang pasar (Nabli & Nugent, 1989). Dalam analisis semacam ini, kerangka kelembagaan hampir selalu dikesampingkan, bahkan dalam banyak kasus dihilangkan sama sekali. Sebagian besar ekonom cenderung menghindari analisis tersebut. Konsekuensinya, saat kerangka kelembagaan dibahas sebagaimana adanya maka analisis kendala-kendala kelembagaan diserahkan kepada para non-ekonomis (ilmuwan politik, pengacara, sosiolog, dan antropolog).

Diskursus tata kelola pemerintahan dalam ilmu ekonomi dapat dilihat dari perspektif ekonomi kelembagaan. Ekonomi Kelembagaan (*Institusional Economic*) merujuk pada pendekatan dalam ekonomi yang menekankan pentingnya institusi, seperti norma, hukum, dan struktur sosial, dalam membentuk perilaku ekonomi dan hasilnya. Ekonomi kelembagaan melihat hubungan antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik secara holistik. Oleh karena itu penting memperhitungkan seluruh sistem sosial dalam analisis ekonomi (Myrdal, 1978).



Myrdal menyebut *soft state* untuk persoalan institusi yang mempengaruhi kegiatan seperti kemalasan dan kurangnya disiplin diri. Myrdal mengkritik tajam a yang ia sebut sebagai “pendekatan modern” di mana ilmu ekonomi

dipisahkan dari cara dan tingkat kehidupan, sikap, institusi, dan budaya, yang mungkin masuk akal di dunia barat tetapi tidak di negara-negara terbelakang (Busch & Myrdal, 1968; Mahalanobis, 1969; Myrdal, 1968).

Gunnar Myrdal, bersama Thorstein Veblen dan John R. Commons, dikenal sebagai tokoh ekonomi kelembagaan lama (EKL). Pada 1990-an, isu kelembagaan kembali mencuat melalui pemikiran Douglass C. North, Ronald Coase, Oliver E. Williamson, dan Elinor Ostrom yang kemudian disebut Ekonomi Kelembagaan Baru (EKB). Titik perbedaan antara EKL dan EKB ada pada sikap terhadap arus utama ekonomi positif. EKL cenderung memandangnya secara negatif, sedangkan EKB justru memanfaatkannya untuk menjelaskan dan menawarkan solusi makroekonomi dalam konteks mekanisme pasar. EKB tidak menolak teori neoklasik, melainkan membangun, memodifikasi, dan memperluasnya dengan memasukkan institusi sebagai variabel penting.

Dalam penelitian ini, istilah “institusi” dipahami setara dengan “kelembagaan” atau “pranata”. North (1991) mendefinisikan institusi sebagai batasan buatan manusia yang mengatur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Institusi mencakup aturan informal (tabu, adat, etika) dan formal (konstitusi, undang-undang, hak milik). Sejarah mencatat bahwa institusi dirancang untuk menciptakan ketertiban dan mengurangi ketidakpastian dalam pertukaran. Institusi bersama dengan batasan ekonomi turut menentukan biaya transaksi, biaya produksi, serta kelayakan dan keuntungan dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian ini fokus pada salah satu aspek kelembagaan ekonomi, yaitu mengenai organisasi resmi yang berhubungan dan berkontribusi terhadap aturan formal. Performa organisasi tersebut dikenal sebagai tata kelola atau dalam istilah

lain dikenal sebagai *governance*. Walaupun *governance* tidak secara khusus membahas lembaga pemerintah (negara) hanya dalam menegakkan



aturan formal saja; tetapi lebih luas lagi, dalam penelitian ini, *governance* mengandung arti pengaturan hubungan-hubungan antara pemerintah (*state*), swasta-bisnis (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*).

Teori Ekonomi Kelembagaan Baru menawarkan pendekatan analitis terhadap fenomena ekonomi dengan mempertimbangkan dua hal utama: biaya transaksi dan informasi serta tindakan kolektif. Pendekatan ini berakar pada pemahaman tentang rasionalitas terbatas dan perilaku oportunistik pelaku ekonomi. Menekankan pentingnya institusi dalam mengurangi ketidakpastian dan mendorong kerja sama. Salah satu elemen kunci dalam EKB adalah konsep hak milik (*property rights*) dan hak secara hukum (*legal right*), yang berperan dalam mereduksi konflik dan biaya transaksi, serta memfasilitasi interaksi ekonomi secara lebih efisien (Nabli & Nugent, 1989). Teori ini secara konseptual sejalan dengan gagasan *governance*, yakni sistem kelembagaan yang mengatur interaksi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Isu tata kelola menjadi semakin penting sejak runtuhnya komunisme pada awal 1990-an, yang menandai pergeseran global menuju demokrasi politik dan ekonomi pasar. Hal ini memicu transformasi dalam pengelolaan sektor publik, beralih dari model birokratis yang hierarkis menjadi manajemen publik baru yang fleksibel dan berorientasi pasar. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, pemerintah di berbagai negara mulai mengutamakan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih responsif.

Lembaga internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF turut berkontribusi dalam mengangkat konsep *governance* dalam wacana pembangunan ekonomi. *Good governance* menjadi prasyarat utama dalam

in bantuan internasional, karena diyakini mampu menjamin efektivitas
aan sumber daya. UNDP mendefinisikan *governance* sebagai



pelaksanaan otoritas politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara. Tata kelola yang baik menggambarkan karakteristik tata kelola: partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. *Governance* terdiri dari mekanisme, proses dan institusi, yang melaluinya warga negara dan kelompok mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak-hak hukumnya, menjunjung tinggi kewajiban dan menjadi perantara dalam perbedaan (UNDP, 1997). Kontribusi teori ini terletak pada penggabungan aspek kelembagaan ke dalam analisis ekonomi, yang sebelumnya diabaikan oleh arus utama. Perdebatan masih muncul mengenai sejauh mana konsep *governance* dapat diterapkan secara universal, mengingat konteks sosial-politik tiap negara berbeda.

Teori tata kelola menjadi sangat penting dalam memahami dinamika pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang. Bank Dunia menyoroti bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi pada 1965–1980, banyak negara menyembunyikan permasalahan serius dalam tata kelola. Persoalan ini terlihat jelas saat pertumbuhan melambat tajam pada periode akhir 1980-an. Terjadi inefisiensi penggunaan sumber daya, kemerosotan nilai perdagangan, kegagalan penyesuaian kebijakan dan pinjaman investasi tidak efektif. Kontribusi utama teori ini adalah mengaitkannya efektivitas pembangunan. Tata Kelola dan Pembangunan (*Governance and Development*) memberikan definisi khusus yang relevan dengan tujuan Bank Dunia: “cara-cara bagaimana kekuasaan dilaksanakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan” (World Bank, 1992, 1994). Dalam konteks ini, tata kelola bukan sekadar institusi, melainkan kerangka normatif dan praktis yang

kan keberhasilan intervensi pembangunan. Hal ini memunculkan



diskursus pada setiap analisis ekonomi, apakah kelemahan pembangunan bersumber dari kebijakan ekonomi atau justru dari tata kelola yang buruk.

Rangkaian penelitian ekonomi kontemporer semakin menekankan pentingnya tata kelola sebagai determinan pembangunan yang efektif. Dalam konteks empiris, tata kelola diukur melalui indikator *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang dikembangkan oleh Daniel Kaufmann dan rekan-rekannya dari Bank Dunia. Teori ini menawarkan kontribusi besar dengan merumuskan pendekatan statistik berbasis *unobserved components model* untuk menggabungkan berbagai sumber data menjadi satu indeks tata kelola agregat yang komprehensif. Keunggulan metodologis pendekatan ini terletak pada kemampuannya mengukur ketepatan data baik pada tingkat individual maupun agregat, sehingga memperkuat validitas analisis empiris dalam studi ekonomi pembangunan (Kaufmann et al., 1999, 2005).

Kontribusi teoritis WGI tercermin dalam klasifikasi tata kelola ke dalam tiga kluster (dimensi) utama: politik, ekonomi, dan institusional. Kluster politik adalah proses di mana mereka yang berwenang (*which those in authority*) dipilih dan diganti, diukur melalui indikator kebebasan berbicara dan akuntabilitas serta stabilitas politik. Kluster ekonomi fokus pada kapasitas negara dalam menyusun kebijakan publik dan memberikan layanan, diwakili oleh efektivitas pemerintah dan kualitas regulasi. Sementara itu, kluster institusi (kelembagaan) merangkum secara luas rasa hormat warga negara dan pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang mengatur interaksi mereka, diukur dengan indikator supremasi hukum dan pengendalian korupsi (Kaufmann, 2012; Kaufmann & Kraay, 2002).

Tentu saja teori ini menimbulkan perdebatan ilmiah, khususnya terkait itas indikator dan artikulasi institusi di setiap negara. Meskipun demikian, ini telah menjadi acuan penting dalam riset ekonomi pembangunan,



khususnya dalam menilai efektivitas kebijakan dan hubungan antara tata kelola dengan pertumbuhan ekonomi. Integrasi tata kelola ke dalam model empiris memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika pembangunan di berbagai negara.

Governance Indicator menuai beberapa kritik yang eksplisit terkait validitas, transparansi perumusan, dan relevansi aplikasi dalam konteks negara berkembang. Arndt dan Oman (2006) menilai bahwa meskipun indikator ini dirancang secara hati-hati, tetap mengandung bias seleksi, kurang transparan, dan tidak cukup akurat dalam menilai efektivitas reformasi tata kelola. Selain itu, WGI sering disalahgunakan oleh aktor eksternal untuk membandingkan kinerja pemerintahan antarnegara atau antar waktu, yang dapat menyesatkan jika tidak memahami konteks spesifik negara bersangkutan. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya transparansi metodologi dalam pemanfaatan data tersebut.

Knack (2007) menyoroti kelemahan metodologis dalam penggabungan berbagai sumber data korupsi. Ia menyatakan bahwa indeks gabungan sering kehilangan ketepatan konseptual karena agregasi yang berlebihan dan ketergantungan antar sumber data, serta seringkali hanya mengukur korupsi administratif, bukan bentuk yang lebih sistemik seperti *state capture* (oligarki politik-ekonomi, dan kelompok kepentingan tertentu). Knack menyarankan tiga hal penting: (i) lebih tepat menggunakan data dari satu sumber daripada indeks gabungan, (ii) waspada klaim presisi statistik dari agregasi data, dan (iii) perlunya pengembangan inisiatif data baru yang menjembatani kesenjangan antara konsep dan pengukuran operasional korupsi.



Thomas (2010) mengangkat isu validitas konstruk, mempertanyakan indikator tersebut benar-benar mengukur apa yang dimaksud. Ia

memperingatkan bahwa ketergantungan pada data yang keliru—bukan sekadar data yang buruk—dapat menyesatkan proses pengambilan kebijakan.

Kurtz dan Schrank (2007) mengajukan dua pertanyaan: Seberapa besar keyakinan terhadap pengukuran tata kelola pemerintahan di seluruh negara? Seberapa kuatkah landasan empiris dalam hubungan sebab akibat antara pertumbuhan dan tata kelola pemerintahan? ukuran-ukuran dominan dalam tata kelola mengandung bias persepsi, seleksi sampel yang merugikan, dan pencampuran konsep dengan kebijakan ekonomi. Bukti justru menunjukkan bahwa pertumbuhan lebih mungkin mendorong perbaikan tata kelola. Hal ini berdampak besar, karena bantuan pembangunan kini sering dikaitkan dengan ukuran kinerja administratif yang bermasalah.

Kaufmann dan rekan-rekannya merespons berbagai kritik terhadap WGI yang dirangkum dalam beberapa poin utama. Kritik tersebut menyebut WGI tidak dapat digunakan secara akurat untuk perbandingan antar waktu dan antar negara karena skala yang distandarkan dan perbedaan sumber data. Perubahan nilai indikator lebih mencerminkan koreksi atas kesalahan masa lalu dibandingkan kondisi riil. Selain itu, indikator dianggap bias terhadap pandangan elit bisnis, terlalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara, dan mengandung kesalahan yang berkorelasi dalam data sumber. Kritik lain menyasar kelemahan dalam agregasi data, kurangnya validitas konstruk, rendahnya transparansi proyek WGI, serta lemahnya bukti hubungan dua arah antara tata kelola dengan pertumbuhan ekonomi.

Kaufmann et al., (2007) menanggapi kritik tersebut dengan empat sanggahan utama. *Pertama*, kritik terhadap perbandingan waktu dan negara dinilai karena gagal memahami sifat indikator agregat dan cara penafsirannya. *Kedua*, koreksi masa lalu dan kesalahan berkorelasi dinilai tidak



signifikan secara empiris. *Ketiga*, “efek halo” yang menyebut negara kaya cenderung mendapat skor lebih tinggi tanpa dasar nyata diakui mungkin terjadi, namun belum terbukti secara empirik. *Keempat*, kritik tentang validitas konstruk dianggap didasarkan pada pendekatan metodologis yang tidak tepat. Kaufmann dkk menekankan pentingnya perdebatan konseptual dan metodologis yang sehat, namun menganggap sebagian besar kritik bersifat terlalu umum dan tidak hanya relevan terhadap WGI, melainkan bisa ditujukan kepada seluruh indikator tata kelola lainnya.

Walupun WGI mendapat berbagai kritik dan keraguan, peneliti sependapat dengan Kaufmann. WGI dapat digunakan dalam penelitian ini, dengan dua alasan. *Pertama*, realibitas dan validitas data bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. *Kedua*, kredibilitas lembaga yang menetapkan WGI, yaitu Bank Dunia sangat diakui. Terbukti hingga saat ini data WGI telah dikaji dan digunakan secara luas dalam penelitian di berbagai bidang keilmuan. Informasi ini dapat dibuktikan dari berbagai disertasi dan tesis (Arndt, 2009; Hussain, 2011; Lahouij, 2017; Yerrabati, 2014), makalah seminar ilmiah maupun jurnal ilmiah internasional bereputasi.

Bagaimana hubungan tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi? Perdebatan tentang hubungan antara *governance* dan pertumbuhan ekonomi menarik. Beberapa makalah mengidentifikasi dampak sebab akibat dari tata kelola yang lebih baik hingga pendapatan per kapita yang lebih tinggi dalam jangka panjang menggunakan data dari berbagai negara (AlShiab et al., 2020; Gani, 2011; Kaufmann & Kraay, 2002; Omoteso & Mobolaji, 2014; Zhuo et al., 2021).

Lahouij (2017) mengkaji berbagai literatur dan menunjukkan bahwa hubungan antara *governance* dan pertumbuhan ekonomi sebenarnya secara teori ambigu. Kausalitas antara kedua variabel tersebut juga bersifat ambigu.



Lahouij akhirnya menyimpulkan ambiguitas tersebut sebagai endogenitas pada tata kelola (*The Endogeneity of Governance*). Lebih lanjut, Kurtz dan Schrank (2007) berpendapat bahwa “ada lebih banyak alasan untuk meyakini bahwa pertumbuhan dan pembangunan mendorong perbaikan tata kelola dibandingkan sebaliknya”.

Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mendorong terciptanya tata kelola yang baik. Kaufmann dan Kraay (2002) menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola cenderung memacu pertumbuhan namun tidak sebaliknya. Yang lain menunjukkan bahwa, rata-rata, pertumbuhan ekonomi jangka panjang mempunyai dampak negatif terhadap kualitas tata kelola pemerintahan di berbagai negara di dunia.

Hubungan antara *governance* terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dikaji secara teoritis menggunakan teori neoklasik dan teori pertumbuhan endogen (Abdelbary & Benhin, 2019; Cooray, 2009; Everhart et al., 2009; Zhuo et al., 2021). Acemoglu, dkk memastikan bahwa institusi berperan dalam pertumbuhan dan pembangunan. Institusi merupakan penyebab fundamental pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Perbaikan dalam institusi, walaupun hal tersebut tidak mudah, akan mempengaruhi pertumbuhan dan bukan sebaliknya (Acemoglu et al., 2004, 2019; Acemoglu & Robinson, 2005, 2010). Kesimpulan ini menjadi dasar teoritis bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Namun menurut Rodrik (2008), kajian tata kelola dalam perspektif ilmu ekonomi harus memegang prinsip agar jangan terjebak dalam motivasi “perbaikan tata kelola sebagai tujuan akhir kajian”, melainkan “sebagai sarana utama dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi”. Para ekonom jangan menjadikan

sebagai tujuan akhir karena hal tersebut bukan merupakan ranah melainkan tugas para ilmuwan politik. Agenda “tata kelola yang baik



(*good governance*)” dan “tata kelola untuk pertumbuhan (*governance for growth*)” kemungkinan besar berbeda secara substansial. Para ekonom jangan berkecimpung pada agenda pertama tetapi bisa banyak berkontribusi dalam agenda kedua, dimana tata kelola terkait erat dengan upaya menstimulasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Tata kelola memiliki nilai instrumental karena menjelaskan kepada produsen dan rumah tangga ekonomi mengenai aturan main dan menjamin investor bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dari setiap bisnis mereka. Inilah poin penting yang perlu ditekankan dalam literatur institusi-dan pertumbuhan (*institutions-and growth literature*) sekaligus menjadi alasan utama reformasi tata kelola dalam konteks strategi pertumbuhan.

2.1.3 Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat

Permintaan dan penawaran agregat menjelaskan proses perekonomian yang terjadi dalam lingkup besar (*aggregate*) dan bagaimana keduanya berinteraksi. Permintaan agregat (*Aggregate Demand, AD*) adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat. Dinamika permintaan agregat terkait dengan tingkat harga dan konsumsi (efek kekayaan), tingkat harga dan investasi (efek suku bunga) dan tingkat harga dan ekspor neto (efek nilai tukar). Sedangkan pergeseran kurva permintaan agregat bisa dipengaruhi jumlah konsumsi (*C*), investasi (*I*), belanja pemerintah (*G*) dan ekspor bersih (*NX*). Relasi permintaan agregat mencakup pengaruh tingkat harga terhadap output. Hal ini dapat diturunkan dari kondisi ekuilibrium dalam pasar barang dan keuangan.

Penawaran agregat dapat dipahami kedalam dua hal, *pertama* output total yang bersedia dipasok oleh semua produsen suatu perekonomian pada setiap tingkat harga. *Kedua*, Output total sebagai fungsi dari jumlah tenaga kerja (Bird, 2005). Penawaran agregat adalah total kuantitas barang dan jasa yang bersedia dihasilkan oleh suatu negara dan dijual dalam suatu periode tertentu.



(Samuelson & Nordhaus, 2004). Penawaran agregat (*Aggregate Supply, AS*) bergantung pada tingkat harga, kapasitas produktif perekonomian, dan tingkat biaya. Karena perusahaan yang memasok barang dan jasa mempunyai harga yang fleksibel dalam jangka panjang namun harga yang kaku dalam jangka pendek, hubungan penawaran agregat bergantung pada jangka waktu.

Permintaan agregat bisa dipengaruhi oleh kebijakan moneter, fiskal dan kekuatan-kekuatan lain. Sedangkan penawaran agregat dipengaruhi oleh tingkat harga, output potensial, modal, tenaga kerja dan teknologi. Interaksi permintaan dan penawaran agregat di dalam pasar mengarah kepada ekuilibrium ekonomi makro. Dimana output keseluruhan dan tingkat harga sesuai (seimbang) antara penawaran dan permintaan agregat. Ekuilibrium ekonomi makro adalah gabungan dari seluruh harga dan kuantitas di mana semua pembeli dan penjual merasa puas dengan pembelian atau penjualan dan harga mereka. Sekali ekuilibrium tercapai, baik pembeli maupun penjualan berharap tidak mengubah kuantitas yang di minta atau di suplai, dan tidak ada tekanan mengubah tingkat harga.

Pada penelitian ini, prinsip permintaan agregat dan penawaran agregat digunakan secara selektif. Tidak semua faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat akan dikaji semisal pengaruh moneter (suku bunga dan jumlah peredaran uang), tingkat harga (inflasi), dan fiskal (pajak).

Pada penelitian ini, penawaran agregat terkandung dalam sektor ekonomi di mana faktor ekonomi dipandang sebagai input seperti perdagangan internasional, investasi (khususnya penanaman modal asing) dan belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan yang berkaitan dengan modal manusia dalam proses ekonomi. Permintaan agregat juga berlaku yang aikan dengan penawaran agregat, dalam hal ini pandangan umum makro terhadap investasi dan belanja pemerintah. Dimana dalam sektor-



sektor ekonomi diasumsikan berlaku mekanisme pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran menuju keseimbangan pasar.

Peranan tata kelola sebagai perangsang (stimulus) non ekonomi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Bilamana tata kelola mampu menjadi “wadah” yang baik bagi pasar, maka akumulasi, alokasi dan distribusi sumber daya akan efisien dan efektif dalam proses sektoral yang dijadikan sebagai “mesin” pertumbuhan.

2. 2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris ini merupakan hasil revidi peneliti-peneliti terdahulu. Pengaruh kualitas tata kelola pemerintahan (*Governance*) terhadap pertumbuhan ekonomi sangat jelas dalam berbagai kajian. Awal mula kajian ini tidak dapat dilepaskan dari studi Kaufmann, Kraay dan Zoido-Lobaton (1999, 2005); Kaufmann dan Kraay (2002); Kaufmann, Kraay dan Zoido-lobaton (2002) yang menekankan bahwa kualitas tata kelola memengaruhi hasil pembangunan (*development outcomes*) dan pertumbuhan ekonomi. Menggunakan pendekatan agregasi berbasis *unobserved components model* untuk menyatukan berbagai indikator persepsi *governance* menjadi enam dimensi tata kelola yaitu *Voice and accountability*, *Political stability*, *Government effectiveness*, *Regulatory quality*, *Rule of law* dan *Control of corruption*. Empat studi awal menyimpulkan *Governance* dianggap sebagai faktor fundamental dalam menjelaskan variasi kesejahteraan lintas negara.

Studi-studi tersebut mengandalkan kombinasi data survei persepsi dari berbagai sumber (eksper/pelaku bisnis/responden domestik) karena data objektif *governance* pada saat itu masih terbatas atau tidak tersedia secara konsisten.

dengan memanfaatkan metode statistik maka kredibilitas estimasi tata regat tetap terjaga. Indikator persepsi yang dihasilkan tetap valid, selama



digunakan dengan kesadaran penuh akan keterbatasannya, seperti bias persepsi dan ketidaktepatan pengukuran. Menegaskan bahwa variabel kelembagaan bukan hanya variabel kontrol, tetapi faktor utama dalam menjelaskan pertumbuhan jangka panjang. Hal ini memperkuat argumen *New Institutional Economics* dari Douglass C. North dan Daron Acemoglu. Metode yang dikembangkan (*unobserved components aggregation*) menjadi dasar bagi indeks *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang kini digunakan secara luas oleh Bank Dunia dan peneliti lintas disiplin.

Lalu bagaimana dengan peneliti yang lain? Rivera-Batiz (2002) mengkaji bagaimana demokrasi mempengaruhi pertumbuhan dalam jangka panjang dengan mempengaruhi kualitas pemerintahan (*how democracy affects long-run growth by influencing the quality of governance*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi dan kualitas tata kelola memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya bahwa demokrasi bisa berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan pengawasan publik jika disertai kapasitas institusional dan masyarakat sipil yang kuat. Tetapi sesuai kritik Kurtz-Schrank, hal tersebut tidak otomatis.

Kurtz dan Schrank (2007) menunjukkan penekanan yang berbeda dengan Rivera-Batiz, meragukan konsensus ilmiah yang menghubungkan tata pemerintahan yang baik, termasuk kualitas administrasi publik, dengan pembangunan ekonomi. Mengklaim bahwa hubungan antara tata kelola dengan pertumbuhan ekonomi sangat kompleks dan sulit dipahami. Data di situs World Bank, hanya sebagian yang benar dan bahkan bisa menyesatkan, bermasalah, mengandung bias persepsi, seleksi pengambilan sampel yang merugikan, dan

tidak secara konseptual dengan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi (*causal conflation with economic policy choices*). Oleh karena itu, disarankan



agar penggunaan indikator tata kelola yang lebih baik dan lebih luas dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk memahami hubungan antara tata kelola dengan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini mengingatkan kita bahwa demokrasi belum tentu menghasilkan perekonomian yang baik, apalagi tanpa dukungan struktural ekonomi.

Peringatan Kurtz dan Schrank tentang bias data menyadarkan penelitian-penelitian selanjutnya. Everhart et al., (2009) mengevaluasi hubungan antara korupsi, tata kelola, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di pasar negara berkembang (*emerging market*). Mereka mengklaim bahwa semua penelitian empiris sebelumnya bermasalah karena tidak mengelompokkan investasi domestik bruto ke dalam sektor swasta dan publik. Ketiadaan pengelompokan tersebut berpotensi membiaskan temuan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak negatif pada investasi swasta, tetapi tidak memiliki dampak signifikan pada investasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Aspek penting dari studi ini terletak pada metodologi model Solow-Romer dengan pemisahan modal publik, swasta, dan SDM.

Penelitian-penelitian tersebut diatas menegaskan agar tidak menyamakan *governance* dengan kebijakan pasar bebas (neoliberal). Ini penting dalam analisis ekonomi politik dan kebijakan publik. Kebijakan *one-size-fits-all*, seperti syarat bantuan internasional berbasis indeks *governance*, bisa kontraproduktif jika tidak mempertimbangkan konteks struktural domestik. Oleh karena itu perlu fleksibilitas metodologi dan menekankan pentingnya desain kebijakan berbasis kanal dampak nyata.

Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan data panel (negara dan waktu). Dalam konteks ekonomi apalagi memasukkan unsur tata kelola tidak tepat sekedar mengambil *sample* negara tanpa melakukan batasan



(pertimbangan) regionalitas, ekonomi dan karakter dan kesejarahan masyarakat. Selain konteks kawasan dan tingkatan perekonomian, penelitian tata kelola perlu memperhatikan asal-usul sumber daya perekonomian. Beberapa penelitian berikutnya dengan sadar mempertimbangkan batasan tersebut.

Kandil (2009) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas institusi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (*Middle East and North Africa*, MENA) dengan batasan negara-negara produsen minyak. Faktor-faktor penentu kualitas kelembagaan berdasarkan enam indikator tata kelola Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Indikator *Governance* penting, tapi tidak semua signifikan secara konsisten. *Governance* berkontribusi terhadap makro stabilitas tetapi tidak menjamin investasi swasta. Faktor-faktor seperti kebebasan ekonomi, kualitas kebijakan, dan risiko kredit juga mempengaruhi kualitas institusi dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

Arti pentingnya kualitas institusi selaras dengan penelitian Cooray (2009) yang mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Kekurangan tersebut diperbaiki dengan mempertimbangkan (menambahkan) faktor kualitas tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik peningkatan pengeluaran publik maupun tata kelola yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun, Huynh dan Jacho-Chávez (2009) mencoba mengkaji kembali hubungan empiris tersebut dengan menggunakan metode nonparametrik. Mengidentifikasi ukuran tata kelola mana yang secara signifikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan ukuran tata kelola mana yang tidak signifikan. Hasil

menunjukkan bahwa hanya tiga dari enam ukuran: suara dan itas, stabilitas politik, dan supremasi hukum yang berkorelasi signifikan



dengan pertumbuhan ekonomi. Kualitas peraturan, pengendalian korupsi, dan efektivitas pemerintah ditemukan tidak signifikan. Terdapat hubungan empiris antara suara dan akuntabilitas, stabilitas politik, dan pertumbuhan sangat nonlinier. Dampak-dampak ini menunjukkan heterogenitas antar indikator, wilayah, dan waktu.

A. Gani (2011); Islam (2012); Valeriani dan Peluso (2011) menunjukkan hasil yang serupa dimana kualitas institusi, tidak terkecuali didalamnya termasuk kualitas administrasi sipil, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Anas (2017); Hadj Fraj et al., (2018); Kim et al., (2018); Liu et al., (2018); dan Peiró-Palomino, (2019) memiliki kesamaan dalam fokus penelitian mereka yang mengeksplorasi hubungan antara tata kelola dengan pertumbuhan ekonomi. Masing-masing artikel menganalisis dalam konteks pemerintahan, lingkungan bisnis, maupun kebijakan moneter, kawasan atau negara yang berbeda. Mengandalkan indikator-indikator tata kelola yang telah dikembangkan Bank Dunia. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola yang baik dapat meningkatkan efisiensi kebijakan ekonomi, stabilitas makroekonomi, investasi, pengembangan infrastruktur, dan distribusi manfaat ekonomi secara adil. Acemoglu et al. (2019) memberikan bukti bahwa demokrasi, sebagai salah satu karakteristik *good governance*, berdampak positif terhadap PDB per kapita. Kajian ini menunjukkan bahwa demokratisasi meningkatkan PDB per kapita sekitar 20 persen dalam jangka panjang.

Alexiou et al., (2020) dalam konteks perekonomian pasca-sosialis, membuktikan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan supremasi hukum, suara, dan akuntabilitas. Dalam jangka pendek, peraturan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun



suara dan akuntabilitas menunjukkan dampak negatif yang membingungkan dan perlu dianalisis lebih lanjut. (Alexiou et al., 2020). AlShiab et al., (2020) membandingkan negara berkembang vs maju. Menyimpulkan ada hubungan positif antara kualitas tata kelola dan pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Selain itu, kontribusi indeks tata kelola global (*Global Governance Index*, GGI) terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang lebih besar dibandingkan negara-negara maju. Zhuo et al., (2021) membatasi studi terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara maju (*developed countries*). Menunjukkan pengaruh signifikan langsung dari supremasi hukum, pengendalian korupsi, dan suara dan akuntabilitas. Namun, terdapat dampak negatif yang bersifat signifikan tidak langsung (*indirect significant effect*) dari *Political Stability*, *Government Effectiveness* dan *Regulatory Quality* terhadap pertumbuhan. Berbeda dengan AlShiab dkk., yang menganggap *governance* sebagai faktor universal, Zhang dkk. justru menilai pengaruhnya bisa berbalik tergantung konteks negara. *Governance* tidak bekerja seragam di semua negara, efeknya sangat kontekstual tergantung tahap pembangunan, serta berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Walaupun begitu, *Governance* tetap menjadi elemen penting dalam mendorong pertumbuhan.

Aminu et al., (2022); dan Funlayo et al., (2022) mengakui pentingnya tata kelola yang baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan benua Afrika. Kedua penelitian tersebut menemukan bahwa indikator-indikator tata kelola yang baik memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua indikator tata kelola yang baik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang diteliti.

Lalu bagaimana dengan kajian tata kelola dan pertumbuhan ekonomi di Asia dan terutama ASEAN? Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa



di ASEAN, faktor politik, seperti stabilitas politik, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Booth, 2016; C. J. Huang & Ho, 2017; Javid et al., 2011; Karimi & Daiari, 2018; Kraipornsak, 2018). Kecuali Booth yang menggunakan pendekatan sejarah di Thailand. Empat penelitian lain menggunakan regresi data panel. Penelitian tersebut memberikan implikasi penting bahwa dengan meningkatkan kualitas institusi, menciptakan situasi stabilitas ekonomi dan bergerak menuju rezim demokratis akan menjamin defisit fiskal yang lebih stabil dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Huang dan Ho membuktikan bahwa berbagai dimensi tata kelola menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan di negara-negara yang “Tidak Bebas” jika dibandingkan dengan negara-negara yang “Bebas” dan “Bebas Sebagian”. Karimi dan Daiari menyimpulkan hubungan positif antara gabungan WGI dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN terpilih. Terdapat dampak positif dari Suara dan Akuntabilitas, Stabilitas Politik dan Tidak Ada Kekerasan/Terrorisme, Efektivitas Pemerintah, Kualitas Regulasi, Supremasi Hukum, dan Pengendalian Korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara terpilih. Penelitian ini juga menemukan adanya efek kausalitas dua arah antara kedua variabel. Kraipornsak menunjukkan bahwa di Thailand dan beberapa negara Asia lainnya, Indeks tata kelola gabungan yang lebih tinggi sebesar 1 persen dari tahun lalu dapat membantu meningkatkan pendapatan per kepala negara sebesar US\$31,34 atau 0,54 persen per tahun.

Syukri et al., (2022) menguji dampak pengeluaran pemerintah, korupsi sebagai indikator tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi dan upah investasi asing langsung di Indonesia. Hasil penelitian membuktikan



bahwa variabel pengeluaran pemerintah, korupsi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing.

Penelitian-penelitian lain menyimpulkan pentingnya tata kelola yang baik dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. Beberapa artikel juga menekankan pentingnya faktor-faktor lain seperti pengeluaran pemerintah, investasi, dan perdagangan bebas dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. (Chetthamrongchai et al., 2020; Dinh Thanh et al., 2020; Hung et al., 2020; Khusaini, 2019; Prasetyia, 2020).

Kesimpulan yang diperoleh dari tinjauan seluruh literatur tersebut dapat dibagi menjadi lima aspek. *Pertama*, teori-teori ekonomi (*economic grand theory*) yang di gunakan. Teori-teori utama yang di gunakan terutama adalah teori institusional. Teori pertumbuhan neoklasik dan endogen juga di gunakan yang kemudian mengarahkan pada pengambilan faktor ekonomi sebagai variabel kontrol. Fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai dasar membuat persamaan model. Ada juga yang menggunakan teori *Trickle-Down Growth and Development* dan teori *Kuznets' Inverted-U Hypothesis* (Hung et al., 2020). Teori Geografi Ekonomi Baru (*New Economic Geography Theory*) dan Teori Perdagangan Baru (Chetthamrongchai et al., 2020). Teori Keseimbangan Ekonomi oleh Barro dan Lucas serta Stokey (Javid et al., 2011). Adapun konsep tata kelola utamanya mengacu pada lembaga UNDP dan Bank Dunia.

Kedua, data yang mewakili tata kelola bisa dari berbagai ukuran. Rivera-Batiz (2002) menggunakan variabel indeks kualitas tata kelola. Everhart et al., (2009) menggunakan Indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index, CPI*) yang di keluarkan oleh *Political Risk Service's International Country Risk Guide*



Indeks persepsi korupsi dari transparansi internasional (Abdelbary & 2019; Gani, 2011; Kandil, 2009; Valeriani & Peluso, 2011). Kandil

menggunakan Indeks kebebasan ekonomi dari *Cato Institute* dan *Heritage Foundation*. Ukuran pemerintah (Cooray, 2009). Gani menggunakan tingkat partisipasi warga negara dalam pemilihan umum. Kualitas administrasi sipil, sifat sistem hukum, sifat sistem politik, tingkat demokrasi, hak asasi manusia (Islam, 2012). Namun, sebagian besar penelitian menggunakan data indikator tata kelola tahunan Kaufman, et.al yang di keluarkan oleh Bank Dunia.

Ketiga, klasifikasi *locus* penelitian. Penelitian tentang tata kelola, idealnya adalah sebuah negara tunggal yang dapat menjamin originalitas. Namun, karena keharusan statistik atas jumlah data observasi minimal, khususnya untuk pendekatan kuantitatif, maka pengolahan data panel menjadi pilihan. Peneliti tata kelola membuat klasifikasi berdasarkan kawasan, tingkat pendapatan, asal-usul sumber daya perekonomian dan bentuk pemerintahan sebagai pertimbangan untuk menghindari bias data.

Keempat, metode-metode yang digunakan. Pendekatan penelitian terhadap tata kelola dan pertumbuhan terbagi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mengambil metode analisis regresi data panel (negara x periode waktu) dengan berbagai variasi teknik uji dan prosedur sesuai tujuan penelitian. Ada juga yang menggunakan metode nonparametrik seperti uji peringkat Wilcoxon dan kurva profil pertumbuhan (Huynh & Jacho-Chávez, 2009). Yerrabati dan Hawkes melakukan meta-sintesis bukti empiris, PIOS criteria (*Population, Independent variable, Outcome variable and Study design*) (Yerrabati & Hawkes, 2015). Analisis komponen utama (*Principal Component Analysis, PCA*) untuk menghasilkan indeks tata kelola sintesis yang merepresentasikan evolusi semua indikator tata kelola (Anas, 2017). *Panel Smooth Transition Regression*

Sedangkan penelitian kualitatif, menggunakan sejarah perubahan yang menguraikan dampak perubahan institusi ke dalam perekonomian



agregat (Acemoglu et al., 2004, 2019; Acemoglu & Robinson, 2005, 2010; Booth, 2016; North, 1991, 1994).

Kelima, penggunaan variabel kontrol. Tujuan penambahan variabel kontrol adalah mengisolasi hubungan kausal agar dapat meningkatkan akurasi dan validasi internal, menambah daya generalisasi dan mengurangi bias. Apa yang tidak dapat di jelaskan oleh tata kelola dalam hubungannya dengan pertumbuhan, sedikit banyak dapat di jelaskan oleh variabel kontrol. Sebagian besar penelitian empiris menambahkan faktor ekonomi sebagai variabel kendali (*control variables*) yang penetapannya sangat tergantung pada landasan teori yang di gunakan. Variabel kontrol seperti persentase populasi yang tinggal di daerah perkotaan, persentase yang telah mengikuti pendidikan tinggi, dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional (Rivera-Batiz, 2002), keterbukaan perdagangan (Chetthamrongchai et al., 2020), keterbukaan perdagangan, faktor daya saing, penetrasi pasar dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Lestari et al., 2022; Reviane et al., 2022).

Investasi Asing Langsung (Aminu et al., 2022; Narayanan et al., 2020). Neraca perdagangan (Kurtz & Schrank, 2007). Investasi swasta dan investasi publik (Everhart et al., 2009). Belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan militer; pertumbuhan populasi (Cooray, 2009, 2010). Investasi bruto, dan tingkat pendaftaran sekolah menengah sebagai *proxy* untuk kualitas modal manusia (Abdelbary & Benhin, 2019). Pertumbuhan populasi, formasi bruto modal tetap, Pendaftaran sekolah menengah atas bruto, Inflasi dan Perdagangan (Gani, 2011). Variabel Infrastruktur diperluas seperti akses terhadap listrik, internet, dan pasokan air (Funlayo et al., 2022).



Penelitian ini berangkat dari kesenjangan teori (*gap theory*) pada teori ihan neoklasik yang yang mengabaikan faktor kelembagaan dalam

analisisnya. Sejarah menunjukkan bahwa negara dengan input modal dan tenaga kerja serupa, serta kebijakan fiskal dan moneter yang sama, belum tentu menghasilkan output yang setara. Ini menandakan adanya faktor lain yang berpengaruh, dan faktor itu adalah tata kelola.

Sementara itu, kesenjangan penelitian (*gap research*) muncul dari keterbatasan studi sebelumnya yang umumnya hanya menggunakan variabel ekonomi sebagai kontrol dalam menganalisis tata kelola, tanpa mengeksplorasi kemungkinan struktur model yang lebih kompleks. Untuk tujuan yang sama, masih terbuka peluang melakukan eksplorasi model melalui penambahan mediasi dan menempatkan variabel tata kelola sebagai moderasi bagi faktor ekonomi.

Penelitian ini memiliki beberapa kebaruan (*novelty*), *pertama*, mengembangkan model menggunakan variabel mediasi (*intervening*) dan moderasi. Penelitian ini mengkaji seperti apa sebenarnya pengaruh tata kelola dan faktor ekonomi terhadap pertumbuhan dengan melihatnya melalui sektor-sektor ekonomi (pertanian, industri dan jasa). *Kedua*, melihat secara spesifik dampak marginal *governance* yang bekerja dalam transmisi faktor ekonomi. Variabel tata kelola menjadi moderasi bagi belanja pemerintah, sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pertumbuhan secara langsung maupun tidak langsung melalui sektor-sektor ekonomi (pertanian, industri dan jasa).

